

S K R I P S I

**PERAN DINAS SOSIAL TERHADAP PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
KABUPATEN SUMBAWA**

**THE ROLE OF SOCIAL SERVICES IN THE DISTRIBUTION OF
SOCIAL ASSISTANCE AS AN EFFORT TO REDUCE PROVERTY IN
SUMBAWA DISTRICT**



**KONSENTRASI ENTERPRENEUR
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2019**

**PERAN DINAS SOSIAL TERHADAP PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
KABUPATEN SUMBAWA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Administrasi Bisnis (S.AB) Pada Program Studi Administrasi Bisnis
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Mataram

OLEH :

FILSA ALVIYANZAH

NIM 21412A0142

**KONSENTRASI ENTERPRENEUR
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN
PERAN DINAS SOSIAL TERHADAP PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
KABUPATEN SUMBAWA

SKRIPSI

Oleh:

FILSA ALVIYANZAH
NIM 21412A0142

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Administrasi
Bisnis (S.AB) Pada Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

Telah diperiksa dan disetujui, serta layak diujikan:

Mataram, 03 Agustus 2019

Pembimbing Utama,



Drs. H. Abdurrahman, M.M.
NIDN. 0804116101

Pembimbing Pendamping,


Lalu Hendra Maniza, S.Sos M.M.
NIDN. 0828108404

Mengetahui,

Kaprodi Studi Administrasi Bisnis
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Ketua


Lalu Hendra Maniza, S.Sos, M.M.
NIDN . 0828108404

...

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN DINAS SOSIAL TERHADAP PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
KABUPATEN SUMBAWA

Oleh:

FILSA ALVIYANZAH
21412A0142

Naskah Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dalam sidang ujian yang diselenggarakan:

Mataram, 03 Agustus 2019

Dinyatakan Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Bisnis (S.AB) Di Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Pembimbing Utama

Drs. H. Abdurrahman, M.M
NIDN. 0804116101

2. Pembimbing Pendamping

Lalu Hendra Maniza, S.Sos, M.M
NIDN. 0828108404

3. Penguji/Penetrasi

Dedy Iswanto, S.T.M.M
NIDN. 0818087901

Mengesahkan,

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,



(Drs. Amil, M.M)
NIDN. 0831126204

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : Filsa Alviyanzah

NIM : 21412A0142

Alamat : Gang Wonogiri No. 8 Pagesangan Timur

Memang benar skripsi yang berjudul *Peran Dinas Sosial Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten* adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing. Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Jika dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti salah, saya siap mempertanggungjawabkannya, termasuk menanggalkan gelar sarjana yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 26 Juli 2019

Yang membuat pernyataan



Filsa Alviyanzah
NIM 21412A0142

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Plampang pada tanggal 02 Agustus 1996, sebagai putra tunggal dari pasangan Bapak Zulkifli dan Ibu Kamariah. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN Brang Kolong pada tahun 2002 dan lulus pada tahun 2008. Penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 3 Plampang pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2011 dan menempuh pendidikan sekolah menengah atas di SMK Negeri 1 Plampang pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Penulis mengikuti tes masuk perguruan tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswa Strata Satu (S1) Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Mataram pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2019.



MOTTO

Kehidupan adalah tentang keberanian.

Keberanian menetapkan pilihan, keberanian

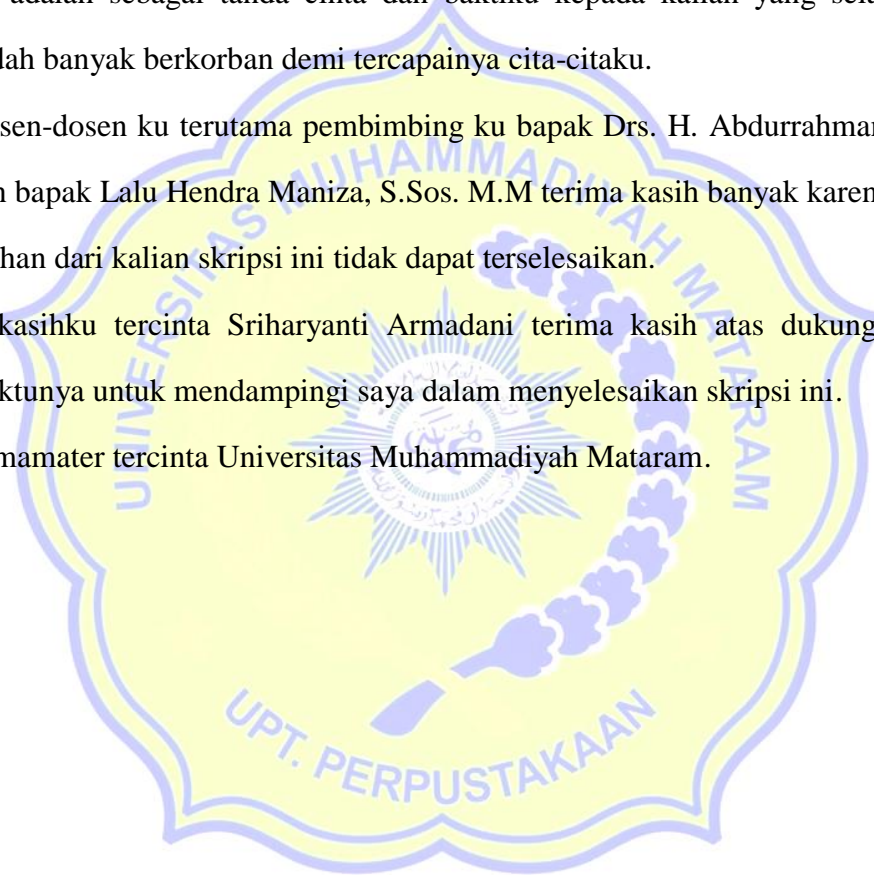
Menjalani pilihan, dan keberanian mengambil resiko atas pilihan.



PERSEMBAHAN

Rasa syukur atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah diberikan oleh Allah SWT, serta dengan penuh rasa kasih sayang dan cinta ku persembahkan kepada.

1. Kedua orang tuaku tersayang bapak (Zulkifli) dan ibu (Kamariah) yang selama ini selalu menyayangi dan mendoakanku disetiap langkahku, skripsi ini adalah sebagai tanda cinta dan baktiku kepada kalian yang selama ini sudah banyak berkorban demi tercapainya cita-citaku.
2. Dosen-dosen ku terutama pembimbing ku bapak Drs. H. Abdurrahman, M.M dan bapak Lalu Hendra Maniza, S.Sos. M.M terima kasih banyak karena tanpa arahan dari kalian skripsi ini tidak dapat terselesaikan.
3. Kekasihku tercinta Sriharyanti Armadani terima kasih atas dukungan dan waktunya untuk mendampingi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Yang telah memberikan rahmat perlindungan dan rezeki-Nya, sehingga skripsi *Peran Dinas Sosial Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sumbawa* dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S-1) Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Drs. H. Arsyad Gani, M.Pd selaku Rektor UM Mataram
2. Drs. H. Junaidi, MM selaku Dekan FISIPOL UM Mataram
3. Lalu Hendra Maniza, S.Sos, MM ketua Prodi Administrasi Bisnis UM Mataram
4. Drs. H. Abdurrahman, MM selaku Dosen Pembimbing I
5. Lalu Hendra Maniza, S.Sos, MM selaku Dosen Pembimbing II
6. Bapak dan Ibu dosen yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif sangat penulis harapkan. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan dunia pendidikan.

Penulis,
Filsa Alviyanzah

Filsa Alviyanzah. 21412A0142. 2019. **Peran Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosial sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sumbawa**. Skripsi. Mataram. Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pembimbing 1 : Drs. H. Abdurrahman, MM

Pembimbing 2 : Lalu Hendra Maniza. S. Sos, MM

ABSTRAK

Objek Material penelitian ini adalah Peran Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosial sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Besar. Terkait dengan permasalahan yang dikaji pada skripsi ini, ada dua permasalahan, yakni: 1) Bagairnanakah peran dinas sosial dalam hal kebijakan, regulasi, strategi dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa? 2) Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di kabupaten sumbawa? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dinas sosial dalam hal kebijakan, regulasi, strategi dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa. Dari teori yang di kemukakan, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peran dinas sosial dalam hal kebijakan, regulasi, strategi dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa, adalah sebagai representasi asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Dinas Sosial) dengan fungsi perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan bantuan sosial di Kabupaten Sumbawa. Dengan adanya SLRT-PK (Satuan Layanan Rujukan Terpadu) “SABALONG SAMALEWA” Dinas Sosial mampu mendukung penyaluran Bansos agar tepat sasaran, melalui pemuktahiran data penerima Bansos. 2) Faktor Penghambat Dalam Penyaluran Bantuan Sosial sebagai upaya penanggulan kemiskinan di kabupaten Sumbawa, minimnya pengetahuan pemohon penerima bantuan sosial (BANSOS) dalam melakukan registrasi dan sering terjadinya kesalahan teknis seperti lupa PIN, belum bisa Memaksimalkan Bantuan yang diberikan.

Kata Kunci : Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Penanggulangan Kemiskinan, Sinergitas program SLRT-PK “SABALONG SAMALEWA” .

Filsa Alviyanzah. 21412A0142. 2019. **The Role of Social Services in the Distribution of Social Assistance as Poverty Reduction Efforts in Sumbawa Regency**. Skripsi. Mataram. Muhammadiyah University of Mataram.

Supervisor 1 : Drs. H. Abdurrahman, MM
Supervisor 2 : Lalu Hendra Maniza. S. Sos, MM

ABSTRACT

The object of this research material is the Role of Social Services in the Distribution of Social Assistance as Poverty Reduction Efforts in Sumbawa Besar Regency. Regarding the problems examined in this thesis, there are two problems, namely: 1) What is the role of social services in terms of policies, regulations, strategies in distribution of social assistance as an effort to reduce poverty in Sumbawa Regency? 2) What are the inhibiting factors in the implementation of social assistance distribution as an effort to reduce poverty in the Sumbawa district? The purpose of this study is to determine the role of social services in terms of policies, regulations, strategies in the distribution of social assistance as an effort to reduce poverty in Sumbawa Regency and to find out the inhibiting factors in the implementation of social assistance distribution as an effort to reduce poverty in Sumbawa Regency. From the theory put forward, researchers used a qualitative descriptive method using data collection techniques through interviews, documentation and observation. The results showed that: 1) The role of social services in terms of policies, regulations, strategies in the distribution of social assistance as an effort to reduce poverty in Sumbawa Regency, is as a representation of the principle of deconcentration and co-administration tasks from the central government to regional governments (Social Service) with the formulation function, organizing, fostering and implementing social assistance in Sumbawa Regency. With the SLRT-PK (Integrated Referral Service Unit) "SABALONG SAMALEWA" the Social Service is able to support the distribution of Social Assistance to be on target, through updating the Social Security recipient data. 2) Inhibiting Factors in the Distribution of Social Assistance As an effort to reduce poverty in Sumbawa district, the lack of knowledge of applicants receiving social assistance (BANSOS) in registering and frequent technical errors such as forgetting PINs, cannot maximize the assistance provided.

Keywords: Sumbawa Regency Social Service, Poverty Alleviation, Synergy of SLRT-PK program "SABALONG SAMALEWA".

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENJELAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Yang Terdahulu.....	9
2.2 Pengertian Peran.....	15
2.3 Pengertian Bantuan Sosial.....	18
2.3.1 Kriteria Pemberian Bantuan Sosial	21
2.3.2 Jenis dan Tujuan Bantuan Sosial	22
2.3.3 Penyaluran Dana Bantuan Sosial.....	23
2.3.4 Pertanggungjawab Penyaluran Dana Bantuan Sosial	25
2.4 Kemiskinan	28
2.4.1 Pengertian Kemiskinan.....	28
2.4.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Menurut Para Ahli	29
2.4.3 Tinjauan Tentang Kemiskinan	34

2.4.4	Masalah Kemiskinan di Perkotaan	37
2.4.5	Kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan	38
2.4.6	Strategi dalam penanggulangan kemiskinan	42
2.5	Kerangka Berpikir / Fokus Penelitian	42
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian	44
3.2	Lokasi Penelitian	44
3.3	Sumber Data	44
3.4	Teknik Pengumpulan Data	45
3.5	Instrumen Pengumpulan Data	47
3.6	Teknik Analisis Data	47
3.7	Keabsahan Data	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa.....	51
4.1.1	Gambaran Standar Pelayanan Dinas Kabupaten Sumbawa	51
4.1.2	Klasifikasi dan Jenis Pelayanan	52
4.1.3	Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa.....	53
4.1.4	Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa.....	54
4.2	Hasil Penelitian	55
4.2.1	Peran Dinas Sosial dalam Hal Kebijakan, Regulasi dan Strategi	55
4.2.2	Program – Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sumbawa	67
4.2.3	Faktor Penghambat dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Sumbawa	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan.....	68
5.2	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai penduduk yang sangat banyak, maka diperlukan peningkatan pembangunan untuk menopang kesejahteraan penduduknya. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pembangunan nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Selain itu, tujuan Pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual, serta menjalankan roda perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 dimana sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat.

Tujuan pembangunan nasional dan Pasal 33 UUD 1945 tersebut akan berhasil tercapai apabila pemerintah dan masyarakat saling bersinergi dalam proses pembangunan, termasuk dibidang kesejahteraan sosial. Dalam permasalahan ini yang cukup krusial dalam bidang kesejahteraan sosial berada pada kasus penanganan anak jalanan, dimana hampir disetiap daerah jumlah anak jalanan mengalami peningkatan. Akan tetapi melihat pada zaman sekarang sebagian masyarakat dalam lingkaran kemiskinan sebagai penyebab utama munculnya anak jalanan (anak jalanan) dan pengemis yang hidup di jalanan yang

dalam penghidupannya masih memerlukan bantuan dari pihak pemerintah agar kiranya dapat berkehidupan normal. Kebijakan dan program untuk menunjang masyarakat sejahtera dari segi sosial. Meninjau dari kebijakan dan program masa lalu cenderung di laksanakan secara kurang efektif, dimana jangkauan pelayanan terbatas, lebih mengedepankan pendekatan institusi atau panti sosial dan dilaksanakan tanpa rencana strategi nasional. Berdasarkan pasal 34 “anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh negara – negara”. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap anak terlantar dan fakir miskin. Pembangunan kesejahteraan sosial, dan khususnya penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemiskinan merupakan program prioritas nasional, karenanya memerlukan pemahaman dan komitmen yang sama pada semua jajaran pemerintah. Pemahaman dan komitmen yang sama itulah tentu akan dapat mempercepat jumlah pengangguran angka kemiskinan di Indonesia berkurang. Masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa dan negara serta membutuhkan kerja keras yang terorganisasi untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Di Indonesia, pentingnya peran negara dalam membangun dan mengimplernentasikan kebijakan publik di bidang kesejahteraan rakyat dilandasi oleh *prespektif Historis, Ideologis, Logis* dan *Universal*.

Kemisikinan merupakan masalah utama negara yang sedang membangun termasuk negara Indonesia, dimana penanggulangannya perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh, kreatif, komprehensif dan berkesinambungan.

Permasalahan kemiskinan yang masih merupakan agenda serius yang dihadapi dan ditanggulangi oleh wilayah perkotaan Kabupaten Sumbawa Besar Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penduduk miskin di Kabupaten Sumbawa Besar Tahun 2015 - 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Data penduduk miskin di Kabupaten Sumbawa

Indikator Kemiskinan	Kemiskinan Kabupaten Sumbawa		
	2015	2016	2017
Jumlah penduduk miskin (Ribuan Jiwa)	73.57	71.66	68.69
Presentasi penduduk miskin (%)	16.73	16.12	15.31
Indeks kedalaman kemiskinan	2.70	3.12	2.60
Indeks keparahan kemiskinan	0.63	0.84	0.63
Garis kemiskinan (Rupiah)	272.274	296.914	300.643

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (*Susenas*) Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa (*Statistics of Sumbawa Regency*).

Terjadinya kemiskinan dan masalah sosial dikarenakan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yaitu ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, ketidak mampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapinya. Kemudian faktor eksternal yaitu kebijakan publik yang belum berpihak kepada masyarakat miskin, tidak tersedianya pelayanan sosial dasar, kesenjangan, dan ketidakadilan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang mendasar dan sangatlah banyak dampak yang ditimbulkan. Kemiskinan dapat menyebabkan lemahnya moral dan etika, pelanggaran hukum & Hak Asasi Manusia (HAM), kerusuhan, anarkisme, serta mudah

masuknya ideologi selain Pancasila, menipisnya cinta tanah air dan bela negara, serta rapuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, masalah kemiskinanlah yang harus segera diselesaikan oleh negara Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan tujuan bangsa Indonesia. Demi pelaksanaan amanat tersebut, negara Indonesia berusaha melakukan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan sasaran atau diprioritaskan pada mereka yang memiliki kriteria masalah sosial kemiskinan. Hal tersebut di atas menurut Bab V (lima) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial harus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bahkan setelah terbitnya Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemiskinan yang berada di kabupaten Sumbawa menuntut kehadiran pemerintah, terutama Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Sesuai dengan peran dan tugasnya, yakni menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, dan salah satunya adalah penanggulangan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks ini membutuhkan Intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah adalah salah satu urusan wajib yang dilaksanakan di daerah adalah urusan sosial, termasuk di dalamnya bidang kesejahteraan sosial. Undang-Undang tersebut dirnaksudkan

untuk mpendekatkan pelayanan pemerintah dengan kebutuhan obyektif masyarakat pada konteks sektor kesejahteraan sosial, agar para penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat ditangani dengan cepat dan tuntas. Melalui kebijakan otonomi daerah, beban dan tugas-tugas pemerintah pusat yang tidak perlu dapat dikerjakan oleh pemerintah daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial mengatakan bahwa kesejahteraan merupakan hak bagi setiap warga negara dan tanggung jawab penyelenggara Negara sebagaimana yang diamanatkan.

Upaya penanggulangan kemiskinan harus dijadikan gerakan bersama. Gerakan yang tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah semata, Namun tersedia ruang yang luas bagi keterlibatan semua pihak untuk: bergotong royong membantu masyarakat dalam meningkatkan harkat dan martabatnya" Hal itu di ungkapkan H. Moh Sapaan Akrah Wakil Bupati Sumbawa dalam membuka rapat penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sumbawa di aula H. Madilaoe ADT lantai 3 kantor Bupati Sumbawa, Selasa (14/3). Wakil Bupati Sumbawa H.M. Husni Djibril, BSc Dalam menurunkan angka kemiskinan merupakan salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Menengah Dearah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021. Target penurunan tingkat kemiskinan menjadi sebesar 66.501 jiwa pada tahun 2021 dari 73.570 jiwa pada tahun 2015 atau rata dua persen pertahun. Target ini membutuhkan semua pihak, Upaya nyata lintas sektor,

Bekerja secara bergotong royong bahu-membahu diantara semua lapisan masyarakat.

Penanggulangan kemiskinan telah diprogramkan secara interen oleh masing- masing perangkat daerah yang mencakup 4 strategi percepatan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin,
- b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin,
- c. Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha mikro dan makro,
- d. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *"Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten sumbawa"* karena dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan masih sangat minim untuk dilakukan dan dengan melakukan penelitian ini kita bisa mengetahui persentasi kemiskinan untuk ditanggulagi.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagairmanakah peran dinas sosial dalam hal kebijakan, regulasi, strategi dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa?

2. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di kabupaten sumbawa?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui peran dinas sosial dalam hal kebijakan, regulasi, strategi dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai pengembangan dimensi hukum administrasi, khususnya mengenai Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Sumbawa Besar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. secara teoritis, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi pengkaji penelitian yang lain.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan maupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu Hukum ataupun rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama.




BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Yang Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian yang terdahulu

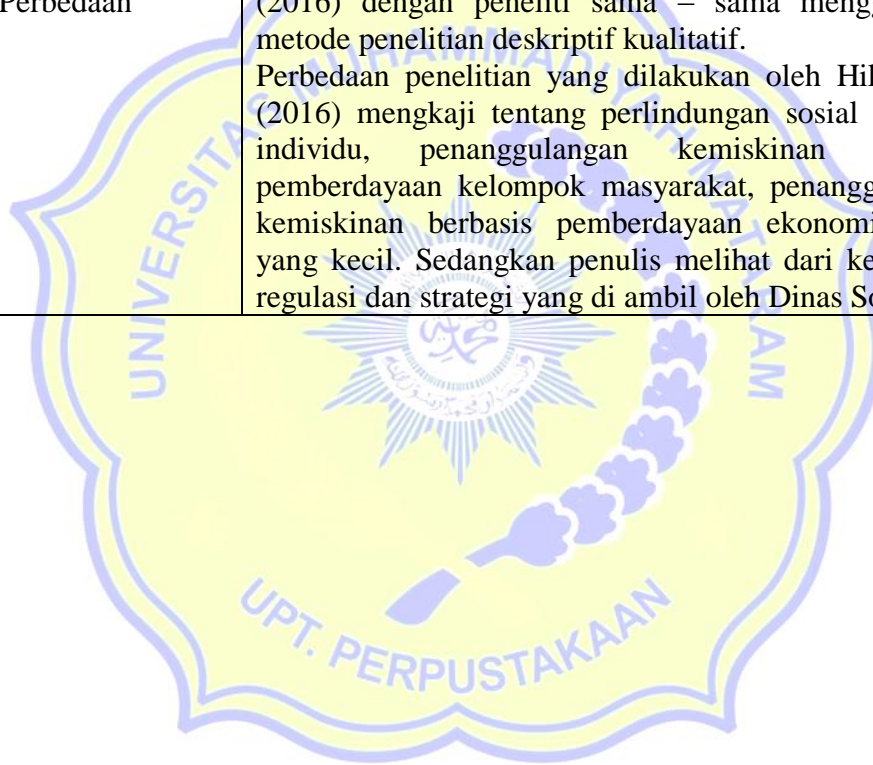
NO	Unsur Penelitian	Uraian
1.	Peneliti	Rima Fitriani (2013)
	Judul	Strategi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kartu Menuju Sejahtera.
	Variabel Penelitian	a. Variabel bebas (Independent Variables) Strategi dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi dapat di ukur dari 1. Pendataan keluarga miskin dan pelaksanaan program Kartu Menuju Sejahtera (KMS). 2. Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Program kartu menuju Sejahtera. b. Variabel tergantung penanggulangan kemiskinan melalui kartu Menuju Sejahtera
	Metode Penelitian	Deskriptif Kualitatif
	Hasil	1. Proses pendataan keluarga miskin di Kota

		<p>Yogyakarta yang akan mendapatkan KMS yaitu dengan menginventaris hasil konfirmasi data dari RT/RW/Kelurahan/Kecamatan atau pekerja sosial masyarakat (PSM). Kemudian melakukan konfirmasi data secara tatap muka pada ketua RT selanjutnya menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi (Kunjungan Rumah) atas data hasil konfirmasi setelah itu hasil pendataan diserahkan ke Dinas Sosial Tenaga dan Transmigrasi sebagai penentuan tahap akhir warga penerima KMS.</p> <p>2. Strategi penanggulangan kemiskinan Dinas Sosial Kota Yogyakarta melalui kebijakan KMS yaitu memberikan akses pada masyarakat miskin terhadap pelayanan pendidikan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu guna penuntasan belajar wajib 12 tahun. Tujuan diberikannya jaminan pendidikan daerah adalah agar tidak ada anak usia putus sekolah dari pemegang KMS yang tidak bersekolah karena alasan biaya sehingga akses pendidikan dapat terjangkau di semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.</p>
<p>Persamaan dan Perbedaan</p>		<p>Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rima Fitriani (2013) dengan peneliti sama – sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.</p> <p>Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rima Fitriani (2013) Mengkaji Tentang Kebijakan pemerintah melalui Program KMS(Kartu Menuju Sejahtera) Sebagai wadah untuk pengentasan kemiskinan sedangkan penulis melihat dari Kebijakan, Regulasi, dan strategi yang diambil oleh Dinas Sosial.</p>



NO	Unsur Penelitian	Uraian
2.	Peneliti	Hikmawati (2016)
	Judul	Peran Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Provinsi Lampung.
	Variabel Penelitian	<p>a. Variabel bebas (Independent Variables) Peran dinas sosial dapat di ukur dari ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran dinas sosial dalam penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan KUBE (Kelompok Usaha Bersama). 2. Pendekatan kelompok usaha bersama (KUBE) sebagai teknis penanggulangan kemiskinan. <p>b. Variabel tergantung penanggulangan kemiskinan</p>
	Metode Penelitian	Deskriptif Kualitatif
	Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran dinas sosial dalam penyaluran bantuan sosial terhadap fakir miskin Perkotaan di Provinsi Lampung adalah sebagai representasi asas dekosentrasi dan tugas pembantuan dari Pemerintah pusat (Kementrian Sosial RI) kepada Pemerintah daerah (Dinas Sosial) dengan fungsi perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan bantuan sosial di Provinsi Lampung dengan pendekatan

		<p>Kelompok Usaha Bersama (KUBE).</p> <p>2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan penyaluran bantuan terhadap fakir miskin di Provinsi Lampung ada 2 diantaranya ; a. minimnya pengetahuan kelompok KUBE di Provinsi Lampung dalam membuat rekening untuk kepentingan bersama yang menghabiskan waktu cukup lama; b. Bahasa, terkadang saat sosialisasi dan evaluasi seksi pemberdayaan fakis miskin dinas sosial Provinsi Lampung mengalami kesulitan interaksi dengan anggota KUBE karena mereka terkadang masih sering menggunakan bahasa suku atau bahasa daerah masing- masing.</p>
Persamaan dan Perbedaan		<p>Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Hikmawati (2016) dengan peneliti sama – sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.</p> <p>Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hikmawati (2016) mengkaji tentang perlindungan sosial berbasis individu, penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan kelompok masyarakat, penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi mikro yang kecil. Sedangkan penulis melihat dari kebijakan, regulasi dan strategi yang di ambil oleh Dinas Sosial.</p>



NO	Unsur Penelitian	Uraian
3.	Peneliti	Didin Ismoyo (2017)
	Judul	Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan
	Variabel Penelitian	<p>a. Variabel bebas (Independent Variables) Peran Pemerintah dapat di ukur dari</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Tingkat Kemiskinan <p>b. Variabel tergantung penanggulangan kemiskinan</p>
	Metode Penelitian	Deskriptif Kualitatif
	Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran Pemerintah Desa Cangkol dalam penanggulangan kemiskinan. Pertama Pembangunan pertanian, kedua Pembangunan masyarakat terpadu, ketiga perbaikan pangan, keempat idustralisasi desa, kelima pembangunan masyarakat dan keterampilan masyarakat, keenam peningkatan kesehatan masyarakat. 2. Faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat kemiskinan di desa Cangkol. Pertama faktor pengangguran, kedua faktor ketidaktepatan pendapatan, ketiga faktor sosial lingkungan, keempat faktor rendahnya tingkat pendidikan

		masyarakat, kelima, faktor rasio ketergantungan penduduk , keenam penmanfaatan sumber daya pertanian belum optimal, ketujuh faktor kesehatan.
	Persamaan dan Perbedaan	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Didin Ismoyo (2017) dengan peneliti sama – sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Didin Ismoyo (2017) mengalisa tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat kemiskinan di desa Cangkol, ingin mengetahui peran pemerintah desa dalam penanggungulng kemiskinan. Sedangkan Penulis Mengkaji Tentang Kebijakan, Regulasi, dan Strategi yang diambil oleh Dinas Sosial.

NO	Unsur Penelitian	Uraian
4.	Peneliti	Supriadi (2017)
	Judul	Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Khilan Di Kota Palopo
	Variabel Penelitian	a. Variabel bebas (Independent Variables) Peran Pemerintah daerah dapat di ukur dari 1. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Khilan 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Khilan di Kota Palopo. b. Variabel tergantung Penanggulangan Kemiskinan
	Metode Penelitian	Deskriptif Kualitatif
	Hasil	1. Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui program Khilan dapat dikategorisasi secara umum menjadi dua peran yaitu penumbuhan iklim usaha dan penguatan potensi atau daya usaha. Penumbuhan iklim usaha meliputi pendanaan, bantuan sarana & prasarana kepada pelaku Khilan, penyebarluasan informasi usaha, kemudahan dalam perizinan usaha, serta bantuan promosi dagang. Penguatan Potensi atau Daya berupa pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia

		serta desain dan teknologi. Semua upaya tersebut telah dilakukan oleh pemerintah Kota Palopo meskipun belum sepenuhnya maksimal. 2. Faktor yang mempengaruhi pemberdayaan Khilan di Kota Palopo meliputi faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat kurangnya inovasi dalam pemasaran dan terbatasnya anggaran yang hanya sekian persen, Sedangkan faktor pendukung subur daya masusia dan sumber daya alam.
	Persamaan dan Perbedaan	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Supriadi (2017) dengan peneliti sama – sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Supriadii (2017) Mengkaji Tentang Peran pemerintah daerah dalam menumbuhkan iklim usaha dalam menguatkan potensi atau daya usaha , Faktor yang mempengaruhi pemberdayaan khilan di kota palopo Sedangkan Penulis mengkaji tentang Kebijakan, Regulasi, dan Strategi di Dinas Sosial.

2.2 Pengertian Peran

Soerjono Soekanto (2002:221) mengemukakan bahwa teori peran (*role theory*) adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi, apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut. Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau prilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dan lingkungannya. Peran merupakan dinamisasi dan statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran

dimaknai sebagai tugas atau pemberian. Tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran dalam konteks hukum meliputi tugas, fungsi dan wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sebagai aspek yuridis peran tersebut. Peran dalam hal ini terbagi menjadi 3 yaitu :

1. Peran Normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran Ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
3. Peran Faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peran merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsi berasal dari kata dalam bahasa Inggris (*junction*), yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang.

Dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.

Secara organisasional fungsi merupakan kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Terdapat wewenang diikat pula hak dan kewajiban, yaitu agar wewenang tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum publik, tetapi juga kewajiban sebagai hukum

publik. Wewenang tidak diartikan kuasa (*an sich*), oleh karena itu, dalam menjalankan hak berdasarkan hukum.

Publik selalu terikat kewajiban berdasarkan hukum publik tidak tertulis (asas umum) pemerintahan yang baik. Kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi:

- a. Pemberian wewenang: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat).
- b. Pelaksanaan wewenang: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan ;
- c. Akibat hukum dari pelaksanaan wewenang; seluruh hak atau kewajiban yang terletak rakyat, kelompok rakyat dan badan.

Pengertian diatas menunjukan bahwa tugas dan fungsi berkaitan erat dengan wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melakukan hubungan hukum.

2.3 Pengertian Bantuan Sosial

Bantuan sosial di definisikan sebagai pemberian bantuan berupa uang atau barang jadi pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Resiko sosial yang dimaksud ialah suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang di tanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik. fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan dana bantuan sosial akan sernakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lernbaga mendefinisikan belanja bantuan sosial sebagai pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungimasyarakat dari kernungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kernampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemberian bantuan sosial disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan secara selektif serta setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pemberian bantuan sosial ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan

Pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan , kepatuan, rasionalisme dan manfaat untuk masyarakat. Bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

1. Individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum,

2. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Bantuan sosial bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui. Bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Bantuan sosial sebagaimana dimaksud diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tiak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Bantuan sosial dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud diartikan bahwa belanja bantuan sosial dapat diberikan untuk mempertabkan taraf kesejahteraan sosial dan mengembangkan kemandirian serta untuk menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar tidak menurun kembali.

2.3.1 Kriteria Pemberian Bantuan Sosial

Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit :

- a. Selektif
- b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan
- c. Bersifat sementara dan tidak menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan
- d. Sesuai tujuan penggunaan.

Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial. Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Memiliki identitas yang jelas
- b. Berdomisili dalam wilayah Kabupaten Sumbawa

Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

(2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

(3) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :

- a. Rehabilitas sosial
- b. Perlindungan sosial
- c. Pemberdayaan sosial
- d. Jaminan sosial
- e. Penanggulangan kemiskinan
- f. Penanggulangan bencana

2.3.2 Jenis dan Tujuan Bantuan Sosial

1. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
2. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
3. Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial sehingga mempunyai daya yang selanjutnya mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
4. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
5. Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud, merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

6. Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

7. Jenis Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

2.3.3 Penyaluran Dana Bantuan Sosial

Penyaluran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata salur yang berarti mengalirkan, mengarahkan, meneruskan atau mendistribusikan. Penyaluran sendiri dapat dipahami sebagai proses, cara, ataupun perbuatan menyalurkan. Penyaluran meliputi aspek pelaksanaan dan penatausahaan. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 . Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur untuk memperoleh dana bantuan sosial, Untuk dapat memperoleh dana bantuan sosial yang harus dilakukan oleh para pemohon, yaitu:

1. Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada kepala daerah,
2. Kepala daerah menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan evaluasi terhadap usulan tertulis tersebut. Jika disetujui oleh kepala SKPD terkait maka akan diberikan rekomendasi kepada kepala daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

3. TAPD akan memberikan pertimbangan atas rekomendasi tersebut sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

4. Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD akan menjadi dasar percantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

5. Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja berkenaan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah, kecuali bantuan sosial kepada individu dan keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penyaluran bantuan sosial kepada individu atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, didasarkan pada permintaan tertulis dari individu atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.

2.3.4 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Sosial

1. Pertanggungjawaban Penerima Dana Bantuan Sosial

Para penerima dana bantuan sosial memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah terkait penggunaan dana bantuan sosial tersebut. Penerima bantuan sosial berupa

uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait, sedangkan penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan bertanggung material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:

- a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial
- b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan yang diusulkan.
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

2. Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Sebagai Penyalur Dana Bantuan sosial

Berdasarkan laporan penggunaan bantuan sosial tersebut, pihak pemerintah daerah akan mencatatnya sebagai bahan laporan pertanggungjawaban penyaluran dana bantuan sosial. Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada

PPKD dalam tabun anggaran berkenaan, sementara bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait. Terkait dengan penyaluran bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, PPKD mernbuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial tersebut paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya, dengan rnemuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu atau keluarga. Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a) Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah
- b) Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c) fakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan.
- d) Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Dalam UU Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003) dan UU Pemenksaan Keuangan dan Akuntabilitas Negara (UU No. 15 Tahun 2005) dijelaskan bahwa laporan keuangan yang akan

dipertanggungjawabkan dan diserahkan, harus terlebih dahulu di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan laporan keuangan menjadi salah satu sarana dalam meminimalkan konflik sekaligus mewujudkan penerapan *good governance*. Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan yang selanjutnya akan diaudit oleh BPK. Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4 Kemiskinan

2.4.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisik dalam kelompok tersebut (Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi: suatu Pengantar*, Rajawali Press). Sedangkan Menurut Ragnar Nurske (1952, *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*, Oxford: Basil Blackwell) lingkaran kemiskinan atau perangkap kemiskinan (*Vicious Cycles of Poverty*) adalah hal yang sering menjadi masalah diberbagai negara atau daerah berkembang.

Akibat kapasitas yang kecil dalam tabungan mengakibatkan *income riil* yang rendah, dimana *income riil* yang rendah menunjukkan produktivitas yang rendah pula. Hal ini berputar lebih besar dan mengakibatkan kekurangan modal. Kekurangan modal inilah yang menyebabkan tingkat kapasitas tabungan yang kecil. *Riil income* yang rendah menurut Nurske, merupakan refleksi dari rendahnya produktivitas. Uni Eropa umumnya mendefinisikan penduduk miskin adalah mereka yang mempunyai pendapatan perkapita dibawah 50 persen dari median (rata-rata) pendapatan. Ketika median atau rata-rata pendapatan meningkat, garis kemiskinan relative juga rneningkat.

2..4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Menurut Para Ahli

a. Hartomo dan Aziz dalam Dadan Hudyana (2009:28-29) yaitu :

1). Pendidikan yang Terlampau Rendah

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.

2). Malas Bekerja

Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.

3), Keterbatasan Sumber Alam

Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumber daya alamnya miskin. Suatu

4). Terbatasnya Lapangan Kerja

Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan,

5). Keterbatasan Modal

Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.

6). Beban Keluarga

Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak dilmbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.

b. Suryadiningrat dalam Dadan Hidayana (2009:30) yaitu

Mengernukakan bahwa kemiskinan pada hakikatnya disebabkan oleh kurangnya komitmen manusia terhadap norma dan nilai-nilai kebenaran ajaran agama, kejujuran dan keadilan. Hal ini mengakibatkan terjadinya penganiayaan manusia terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Penganiayaan manusia terhadap diri sendiri tercermin dari adanya :

- 1) Keengganan bekerja dan berusaha,
- 2) Kebodohan,
- 3) Motivasi rendah,
- 4) Tidak memiliki rencana jangka panjang,
- 5) Budaya kemiskinan,
- 6) Pemahaman keliru terhadap kemiskinan.

Sedangkan penganiayaan terhadap orang lain terlihat dari ketidak mampuan seseorang bekerja dan berusaha akibat :

- 1) Ketidak pedulian orang mampu kepada orang yang memerlukan atau orang tidak mampu
- 2) Kebijakan yang tidak memihak kepada orang miskin.

c. Kartasmita dalam Rahmawati (2006:4)

Mengemukakan bahwa, kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat penyebab, diantaranya yaitu :

1. Rendahnya Taraf Pendidikan

Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan seseorang untuk mencari dan memanfaatkan peluang.

2. Rendahnya Derajat Kesehatan

Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa,

3. Terbatasnya Lapangan Kerja

Selain kondisi kemiskinan dan kesehatan yang rendah, kemiskinan juga diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan.

4. kondisi Keterisolasian

Banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

d. Nasikun dalam Suryawati (2005:5)

Menyoroti beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu :

- a. Pelestarian Proses Kemiskinan Proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan
- b. Pola Produksi Kolonial Negara ekskoloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanab yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.
- c. Manajemen sumber daya Alam dan Lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal terbang akan menurunkan produktivitas.
- d. Kemiskinan terjadi karena siklus alam misalnya tinggal di lahan kritis, dimana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir tetapi jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
- e. Peminggiran kaum perempuan dalam hal ini perempuan masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari laki-laki.
- f. Faktor budaya dan etnik bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan seperti, pola hidup

konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara dat atau keagamaan.

2.4.3 Tinjauan Tentang kemiskinan

Pada umumnya terdapat dua indikator untuk mengukur tingkat kemiskinan di suatu wilayah, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Mengukur kemiskinan dengan mengacu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut, sedangkan konsep kemiskinan yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif (Tarnbunan, 2001).

a Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut merupakan ketidakmampuan seseorang dengan pendapatan yang diperolehnya untuk mencukupi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup setiap hari. Kebutuhan minimum tersebut diterjemahkan dalam ukuran finansial (uang). Nilai minimum tersebut digunakan sebagai batas garis kemiskinan. Garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat yang selalu konstan secara riil, sehingga dapat ditelusuri kemajuan yang diperoleh dalam menanggulangi kemiskinan pada level *absolut* sepanjang waktu. *World bank* menggunakan ukuran kemiskinan *absolut* ini untuk menentukan jumlah penduduk miskin. Menurut *world bank*, penduduk miskin adalah mereka yang hidup kurang dari US\$1 per hari dalam dolar PPP (*Purchasing Power Parity*). Akan tetapi, tidak semua

negara mengikuti standar minimum yang digunakan world bank tersebut, karena bagi negara- negara berkembang level tersebut masihlah tinggi, oleh karena itu banyak negara menentukan garis kemiskinan nasional sendiri dimana kriteria yang digunakan disesuaikan dengan kondisi perekonomian masing-masing negara.

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menentukan kemiskinan absolut Indonesia merupakan ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum energi kalori(2.100 kilo kalori per kapita per hari) yang dipergunakan tubuh dan kebutuhan dasar minimum untuk sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kebutuhan dasar lain

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat setempat sehingga proses penentuannya sangat subyektif Mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif Kemiskinan relatif ini digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Badan pemerintah yang menggunakan ukuran kemiskinan relatif misalnya BKKBN. BKKBN mendefinisikan miskin atau kurang sejahtera dalam pengertian Pembangunan Keluarga Sejahtera yang terdiri atas keluarga pra- sejahtera dan keluarga sejahtera, Keluarga pra-sejahtera adalah keluarga-keluarga yang belum dapat

memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan keluarga berencana, Sedangkan keluarga sejahtera adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis, serta kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.

2.4.4 Masalah kemiskinan di perkotaan

Menurut Parsudi Suparlan (1993) akar dari timbulnya masalah kemiskinan di perkotaan adalah karena kedudukan kota-kota dalam masyarakat negara tersusun dalam jaringan yang bertingkat-tingkat dan merupakan pusat-pusat penguasaan bagi pengaturan kesejahteraan, kehidupan warga masyarakat negara, Sedangkan bagian terbawah dalam sistem penguasaan adalah pedesaan. Karena itulah manusia cenderung berorientasi ke kota atau dengan kata lain, orang desalah yang berorientasi ke kota dan bukan orang kaya yang berorientasi ke desa, Karena adanya kecenderungan orientasi pada kota, kota akan cenderung tumbuh terus menerus dan menjadi semakin kompleks karena kota mempunyai potensi atau kemampuan untuk menampung pendatang-pendatang baru dari pedesaan dan kota-kota lainnya atau tempat-tempat lainnya. Kemampuan atau potensi kota adalah karena corak sistem ekonomi lebih menekankan pada pekerjaan-pekerjaan dalam bidang industri dan produksi barang jadi atau setengah jadi. Pekerjaan dalam bidang-bidang tersebut dapat menampung pekerjaan kemanapun keahlian dalam teknologi tinggi, maupun pekerjaan yang hanya mengandalkan pada keterampilan dan

kekuatan tenaga kasar. Perbandingan perkotaan dengan pedesaan lebih banyak terdapat alternative untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan keahlian dari yang paling halus sampai dengan yang paling kasar, dari yang paling bersih sampai dengan yang paling kotor dan dari yang bermolar sampai dengan yang tidak bermoral, Sedangkan di daerah pedesaan, sistem ekonominya lebih menekankan pada penghasilan bahan-bahan mentah dan bahan makanan. Maka alternatif-alternatif yang tersedia atau yang ada dalam sistem ekonomi tersebut lebih terbatas dari pada yang terdapat dipertanian.

2.4.5 Kebijakan dalam Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah melalui UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang PROPENAS, menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai satu dari beberapa prioritas. Sasaran penanggulangan kemiskinan ini adalah menurunkan jumlah penduduk miskin, meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar terutama pendidikan, kesehatan dan prasarana dasar termasuk air minum dan sanitasi; mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin terutama untuk pendidikan dan kesehatan, prasarana dasar khususnya air minum dan sanitasi, meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin; dan meningkatkan pendapatan dan kesempatan berusaha kelompok masyarakat miskin, termasuk meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap permodalan, bantuan teknis, dan berbagai sarana dan prasarana produksi.

Dalam pengimplementasiannya, Sumodiningrat (1996) mengelompokkan kebijakan penanggulangan kemiskinan menjadi tiga berdasarkan target/sasarannya, yaitu:

1. Kebijakan yang bersifat tidak langsung, dimana kebijakan diarahkan untuk memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin. Kebijakan ini lebih diarahkan pada penciptaan kondisi menjamin kelangsungan setiap upaya peningkatan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, penyedia sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan serta penyempumaan peraturan perundang-undangan yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

2. Kebijakan yang bersifat langsung; dimana kebijakan/program mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran. Kebijaksanaan langsung diarahkan pada peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana yang mendukung penyediaan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, pennehan, kesehatan dan pendidikan.

3. Kebijakan yang bersifat khusus, dimana program diarahkan untuk menjangkau masyarakat miskin dan daerah terpencil melalui upaya yang sangat khusus. Kebijakan khusus diutamakan pada penyiapan penduduk miskin di lokasi yang terpencil untuk dapat melakukan kegiatan sosial ekonomi sesuai dengan budaya pada masyarakat setempat,

Mustopadidjaja (1998) berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada 3 unsur penting yaitu:

1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
2. Adanya dukungan dari target group atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari perubahan
3. Unsur pelaksanaan, baik organisasi maupun program yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut

Sementara itu, Ndara (1997) berpendapat bahwa sikap dan perilaku merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Sikap adalah kecenderungan jiwa terhadap sesuatu, sedangkan perilaku adalah operasionalisasi dan aktualisasi sikap seseorang atau kelompok dalam atau terhadap situasi dan kondisi lingkungan baik masyarakat, alam, teknologi atau juga organisasi.

Dalam rangka mendekati kebijakan publik yang di formulasikan (kebijakan makro) dengan operasionalisasi program-program dilapangan, diperlukan pendekatan yang holistik dan terpadu baik kebutuhan program yang berdampak langsung dan berjangka pendek seperti *Crash program*, peningkatan usaha produktif dan lain sebagainya, maupun berdampak tidak langsung yang sifatnya berjangka menengah dan panjang seperti penyediaan prasarana dan sarana untuk

memberikan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan, kemudahan serta menunjang mobilitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat khususnya orang-orang miskin. Kebijakan dan program bantuan sosial yang merupakan *Crash Program* dalam rangka penanggulangan kemiskinan untuk kelompok rentan perlu diimplementasikan secara baik khususnya dalam hal kriteria dan identifikasi kelompok sasaran penerima.

Bidang kesehatan merupakan komponen penting bagi upaya penanggulangan kemiskinan. Pendekatan program ini apabila akan diteruskan perlu dilakukan secara komprehensif berbasis keluarga. Dengan pendekatan keluarga maka program pendidikan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, program peningkatan kesehatan bagi ibu hamil dan anak balita akan terlaksana dengan baik. Juga kepala keluarga akan memperoleh kemudahan dalam mengakses sumber-sumber permodalan, termasuk bantuan dana bergulir atau program padat karya.

Pada akhirnya dampak dan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan sangat tergantung pada kapasitas si miskin sendiri yang tercermin dalam *knowledge, attitude* dan *practices* untuk berjuang keluar dari belenggu kemiskinan. Dalam program kemitraan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) maka diharapkan dapat meningkatkan produktivitas UMKM

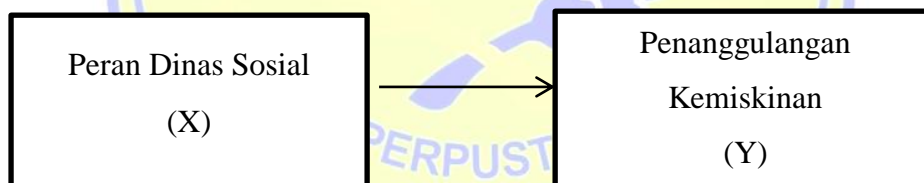
penerima bantuan dana, meningkatkan keuntungan dan mengurangi pengangguran.

2.4.6 Strategi dalam Penanggulangan Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan menurut UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Proenas ditempuh melalui strategi utama. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, Kedua, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam tiga program yang langsung diarahakan pada penduduk miskin, yaitu :

- 1) Penyediaan kebutuhan pokok
- 2) Pengembangan sistem jaminan sosial
- 3) Pengembangan budaya usaha masyarakat miskin

2.5 Kerangka berpikir/fokus penelitian



Fokus penelitian ini adalah:

1. Mengkaji tentang peran Dinas Sosial Dalam Hal Kebijakan, Regulasi dan Strategi.

2. Mengkaji hal-hal yang menghambat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Besar.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut David Williams (1995, dalam Moleong,2005:3) penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah, dengan menggunakan metode ilmiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah, Dari teori yang di kemukakan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Peran Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosial sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Besar dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif ini dimaksudkan agar penelitian ini dapat menggambarkan dan mendeskripsikan variabel, mengungkap kejadian atau fakta, keadaan, serta fenomena yang terjadi dilapangan saat melakukan penelitian.

3.2 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dari penelitian ini yaitu di Dinas Sosial Jl. Kebayan, Uma Sima Kecamatan sumbawa Kabupaten Sumbawa Besar.

3.3 Sumber Data

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah berupa jawaban dari kuesioner atas pertanyaan atau pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti,

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung dari sumber informasi yang bukan di usahakan sendiri oleh peneliti. Misalnya berupa laporan- laporan, dokumen, literatur, dan bacaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.4 Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam Penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono,2016:224). Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data skunder. Dalam usaha pengurnpulan data serta keterangan yang diperlukan, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1.wawancara

Esterberg (2002) dalam (Sugiyono, 2016:231) mengungkapkan wawancara Adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

2.Dokumentasi

Bogdan dalam (Sugiyono,2014:240) mengungkapkan dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Jadi, dokumentasi bukanlah catatan peristiwa yang terjadi saat ini atau masa yang akan datang, namun catatan masa lalu.

3.Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain. Karena Observasi tidak selalu dengan obyek manusia tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Sutrisno Hadi dalam (Sugiyono, 2012:145) mengemukakan bahwa, Observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses Biologis dan Psikologis, Dua diantara yang terpenting adalah proses Pengamatan dan Ingatan,

Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu :

1. Informan kunci (*key informan*) yaitu Informan yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian,
2. Informan biasa, yaitu Informan yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti. Hendraso dalam (Suyanto, 2005, hal, 171-172).

Dari penjelasan yang sudah diterangkan diatas, maka penelitian menggunakan teknik *Purposive Sampling* dalam menentukan informannya. Subjek dari penelitian ini ditentukan berdasarkan *purpOsive sampling* yaitu pengambilan informan dengan pertimbangan dan kriteria tertentu. *Puposive sampling* menurut Sugiyono (2016, hal 218) adalah Teknik untuk

menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan data yang diperoleh nantinya bisa lebih representati.

3.5 Instrumen Pengumpulan Data

Untuk dapat mendukung berjalanya penelitian dalam mengumpulkan informasi, peneliti menggunakan:

1. Pedoman wawancara
2. Alat dokumntasi berupa, handphone, camera, alat perekam dan lain-lain.

3.6 Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data secara keseluruhan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang dikutip dari Matthew B. Milles dan Michael huberman (1992:16-21) mengenai analisis kualitatif terdiri dari tiga jalur yang selalu bersamaan yaitu Reduksi data, Penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berikut penjelasan kegiatan analisis yaitu:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dapat berupa jawaban dari pedoman wawancara yang dibuat oleh penulis, informasi yang di dapat dari aparatur desa dan penelitian terdahulu serta buku yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Reduksi data

Dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik reduksi data agar penelitian dapat terpusat sesuai dengan keinginan peneliti. Selain itu, reduksi data juga digunakan agar dapat mempermudah dalam penyajian data dan penarikan kesimpulan.

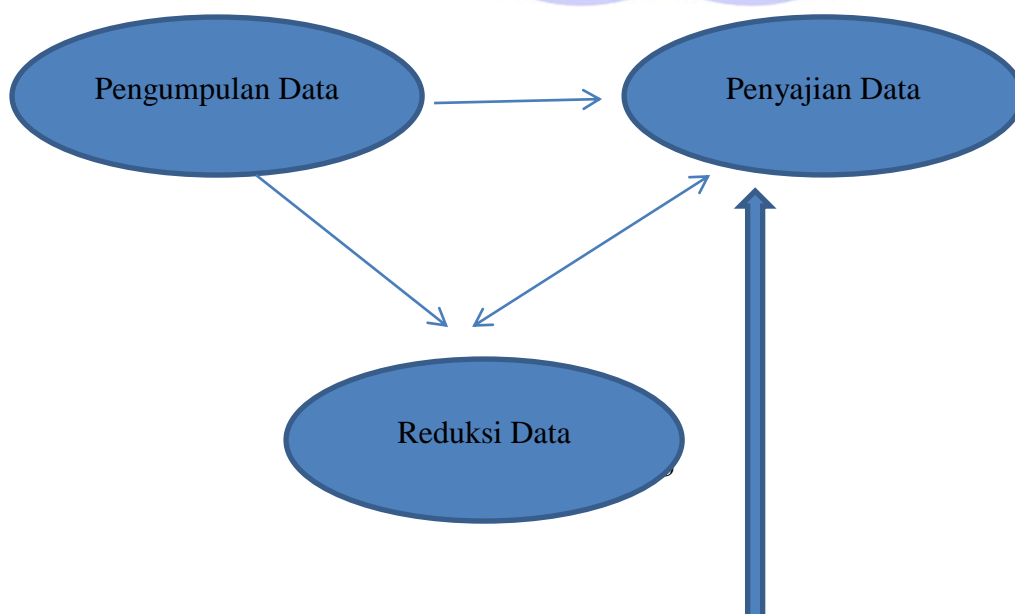
3. Penyajian data

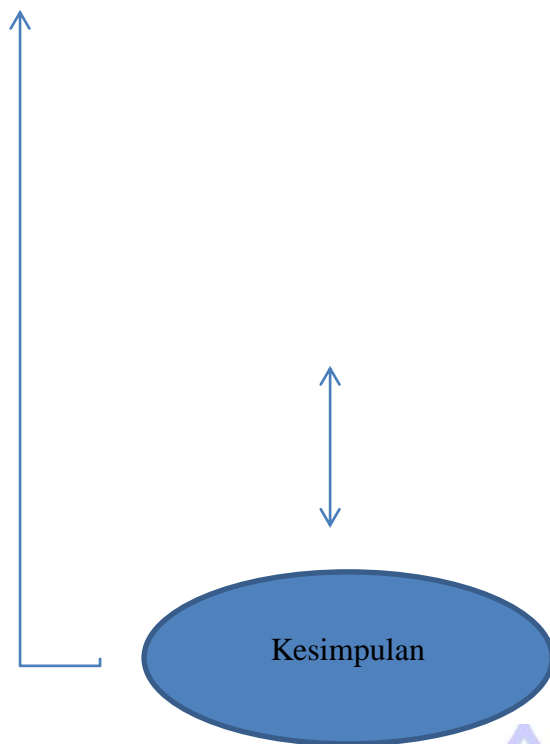
Dalam penyajian data harus dapat menggambarkan penelitian yang dilakukan secara terperinci agar dapat dengan mudah dimengerti hingga ke variabel-variabel terkecil dari penelitian.

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan harus mampu menjawab pertanyaan penelitian dan mampu menjelaskan hasil penelitian secara singkat yang dilakukan oleh peneliti dan berisi fakta-fakta dari lapangan yang mampu menjawab rumusan masalah dan pertanyaan penelitian.

Analisis data (*Interactive model*) pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut:





(Miles dan Huberman dalam Rachman, 2011 : 175)

3.7. Keabsahan Data

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Lexy J. Moleong (2000) menjelaskan bahwa teknik triangulasi adalah reknik pemeriksaan validitas data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dengan demikian, triangulasi merupakan sebuah pandangan yang bersifat multiperspektif Denzin (dalam Moleong, 2002 : 178) menyatakan ada empat macam teknik triangulasi, yakni (1) triangulasi sumber, (2) triangulasi metode, (3) triangulasi penyidik, dan (4) triangulasi teoritis

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yang dimana peneliti membandingkan sumber dan membandingkan informasi yang diberikan oleh masing-masing informan, apakah informasi yang diberikan tersebut sesuai atau tidak dengan realitas di lapangan pada